

BAB II

PROFIL *INTERNATIONAL LABOR RIGHT FORUM*

Pada bab akan membahas tentang profil gerakan *International Labor Right Forum*, sejarah terbentuknya hingga keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran hak-hak pekerja.

A. Sejarah dan Perkembangan *International Labor Right Forum*

International Labor Right Forum didirikan pada tahun 1986 di Washington D.C oleh berbagai koalisi gabungan yang terdiri dari pekerja, penegak HAM dan juga akademisi. *International Labor Right Forum* merupakan organisasi non-profit yang bergerak dibidang advokasi yang memberikan bantuan kepada para pekerja yang tidak mendapatkan keadilan. Berdirinya organisasi ini di latar belakang oleh keinginan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dalam perdagangan Internasional di tahun 1980an. Kemudian di tahun 1984 koalisi gabungan berhasil memenangkan perundingan terkait hak-hak pekerja yang kemudian diatur dalam GSP yang menegaskan bahwa negara akan menghormati hak-hak dasar pekerja. Melihat keberhasilan ini, koalisi gabungan yang ada kemudian memutuskan untuk membuat sebuah organisasi non-profit yang bertujuan membantu memperjuangkan keadilan bagi hak-hak pekerja pada tahun 1986. Pada awalnya organisasi ini bernama *International Labor Rights Education & Research Fund* yang kemudian berubah menjadi *International Labor Right Forum*. (International Labor Right Forum, 2014)

Gambar 2. 1 Lambang International Labor Right Forum



Sumber : www.laborrights.org

Visi dari organisasi ini adalah bekerja untuk dunia di mana para pekerja memiliki kekuatan untuk bersuara dan berorganisasi untuk membela dan memajukan hak dan kepentingan mereka; sebuah dunia di mana para pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja dan berunding bersama untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi diri mereka dan keluarga mereka; dan dunia di mana setiap orang bebas dari diskriminasi, kerja paksa dan pekerja anak. Sedangkan misi dari organisasi ini adalah mencapai martabat dan keadilan bagi para pekerja di seluruh dunia. Melihat visi dan juga misi maka pekerjaan *International Labor Right Forum* dapat dirangkum dalam tiga hal sebagai berikut :

1. Meminta pertanggungjawaban kepada korporasi global atas pelanggaran hak pekerja yang melibatkan mereka
2. Memajukan kebijakan undang-undang yang mengatur hak-hak perlindungan bagi para pekerja.
3. Meningkatkan kemampuan para pekerja agar dapat mengadvokasi hak-hak mereka.

Dalam menjalankan visi dan misinya, *International Labor Right Forum* menganut nilai-nilai berupa :

1. Hak-hak buruh adalah universal dan tidak dapat dicabut.

"Pelanggaran terhadap hak satu pekerja adalah pelanggaran terhadap semua hak pekerja." Semua pekerja dan orang-orang yang turut memperjuangkan hak pekerja perlu membangun jaringan global yang bertujuan untuk memastikan serta mengawasi agar hak pekerja dapat diterima sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

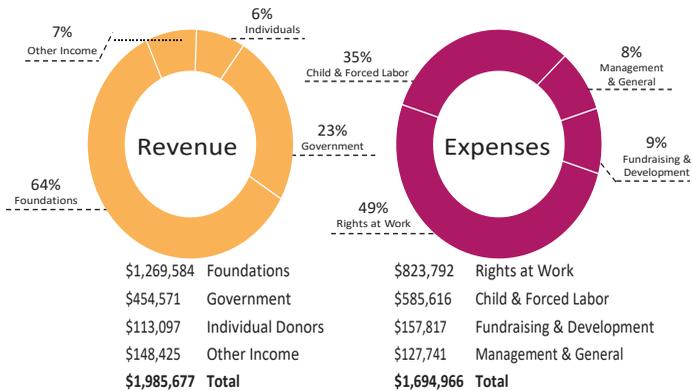
2. Hak-hak buruh adalah pilar sentral keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan peluang kerja yang layak untuk orang dewasa, keluarga mampu mengirim anak-anak ke sekolah. Dengan upah layak, hak atas kesehatan lebih mudah dicapai. Ketika kesetaraan dapat tercapai, perempuan dan minoritas mendapat jaminan tempat dalam masyarakat. Dan dengan kemampuan untuk berorganisasi dan berunding bersama yang dimiliki para pekerja dapat berpartisipasi dalam membangun dan memelihara masyarakat yang demokratis.
3. Pekerja anak dan kerja paksa merupakan akibat dari ketidakadilan sosial yang terus terjadi. Pekerja anak, terutama pekerja anak terikat, adalah salah satu praktik perburuhan yang paling mengerikan dan eksploitatif. Faktor kemiskinan merupakan salah satu alasan sulitnya menghentikan praktik pekerja anak. Perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai cara mengatasi permasalahan ini seperti kebijakan migrasi, hak kebebasan bagi pekerja untuk berorganisasi dan pemberian upah yang layak baik bagi pekerja paruh waktu maupun pekerja penuh.
4. Untuk mencapai perubahan, para pekerja dan mitra komunitas mereka butuh dukungan solidaritas global. Hanya pekerja yang dapat membuat hak-hak buruh bermakna; kebijakan pemerintah, perdagangan global dan praktik bisnis harus dibuat untuk memungkinkan dan melindungi pekerja melaksanakan hak-hak tersebut.

5. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui dan kekuatan untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepentingan antara konsumen dan pekerja dalam mengadvokasi pekerjaan dapat terhubung dengan baik. Dengan memajukan transparansi dan solidaritas, dapat meningkatkan skala ekonomi global ke ukuran manusia, menjembatani jurang antara pekerja dan konsumen, memperdalam solidaritas internasional, dan menggabungkan kekuatan pekerja dalam perjuangan bersama untuk keadilan ekonomi dan sosial. (International Labor Right Forum, t.thn.)

B. Sumber Dana *International Labor Right Forum*

Pendapatan yang diperoleh oleh *International Labor Right Forum* didapatkan melalui berbagai sumber yaitu yayasan, pemerintah serta individu.

Gambar 2. 2 Financial Summary ILRF 2014



Sumber: www.laborrights.org

C. Keterlibatan *International Labor Right Forum* dalam Berbagai Kasus Pelanggaran Hak Pekerja

Seiring dengan perkembangannya, keterlibatan *International Labor Right Forum* dalam berbagai kasus pelanggaran hak pekerja tidak hanya sebatas wilayah Amerika Serikat saja namun berkembang hingga berbagai negara di dunia. Hal ini membuat *International Labor Right Forum* memiliki peran penting dalam merancang solusi dan penyelesaian yang melibatkan hak pekerja didalamnya. Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari kerja sama yang terjalin antara *International Labor Right Forum* dengan berbagai aktor lainnya yaitu koalisi NGO, serikat pekerja, organisasi HAM, akademisi, organisasi keagamaan dan juga adanya dialog dengan pemerintah dan pemilik bisnis. *International Labor Right Forum* membangun kampanye transnasional dan juga menjalin kemitraan dengan beberapa negara yang mempunyai kelompok-kelompok pekerja yang mampu berkomitmen untuk terus memberdayakan pekerja. (International Labor Right Forum, 2014).

1. Thailand

Thailand merupakan salah satu negara pengeksport seafood terbesar. Banyak pekerja migran yang berasal dari negara-negara tetangga yaitu Myanmar, Kamboja dan Laos. Adanya kebijakan imigrasi dan tenaga kerja yang diskriminatif membuat para pekerja migran ini menggantungkan nasibnya kepada para perekrut kerja dan juga adanya larangan untuk membuat serikat kerja sehingga menyulitkan para pekerja jika pengusaha terkait melakukan pelanggaran terhadap hak mereka. Keterlibatan *International Labor Right Forum* pada permasalahan di Thailand dimulai pada tahun 2012 dengan mendokumentasikan kasus kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor seafood yang juga didukung oleh Humanity United. (International Labor Right Forum, 2018)

Kemudian di tahun 2013, *Humanity United* bersama dengan ILRF membentuk *Thai Seafood Working Group* yang merupakan koalisi dari hampir 60 organisasi hak asasi manusia, buruh dan lingkungan dari 15 negara. Working Group ini bertujuan untuk mempromosikan kondisi yang bebas dan adil bagi semua pekerja di sektor seafood Thailand. Selain itu, Working Group ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan atas penangkapan ikan secara ilegal. Se jauh ini, Working Group telah mampu menunjukkan pengaruhnya dengan bekerja sama dengan pemerintah Thailand, Amerika Serikat dan Uni Eropa serta pejabat industri. Dengan menjalin hubungan yang erat dengan aktor-aktor tersebut, *Thai Seafood Working Group* dapat mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Selain dengan pemerintah, *Thai Seafood Working Group* juga mampu mempengaruhi perusahaan-perusahaan seperti Thai Union dan Walmart untuk mengubah cara kerja mereka agar dapat meminimalisir eksploitasi pekerja di sektor seafood. (International Labor Right Forum, 2018)

2. Indonesia

Gambar 2. 3 Peta Lokasi Perkebunan PT Kerry Sawit Indonesia



Sumber :<https://laborrights.org/industries/palm-oil>

Permasalahan pekerja di Indonesia yang mejadi sorotan ILRF adalah pada perkebunan kelapa sawit. Keterlibatan ILRF pada kasus ini dimulai di tahun 2012,

staff lokal di Indonesia melakukan investigasi dan wawancara kepada beberapa pekerja. Kelapa sawit di Indonesia sendiri terletak di Kalimantan Tengah dan dikuasai oleh PT Kerry Sawit Indonesia (PT KSI). Investigasi ini dilakukan guna mencari informasi terkait kasus *labor trafficking*. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu pekerja, didapatkan bukti atas *labor trafficking*. Pekerja ini mengatakan bagaimana ia mendapat tawaran untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan gaji sebesar dua-tiga juta rupiah namun ternyata yang ia terima hanya sebanyak Rp 200.000,-

Gambar 2. 4 Peta Lokasi PT Sochfindo Bandun Bandar



Sumber: <https://laborrights.org/industries/palm-oil>

Selain *labor trafficking*, permasalahan yang menjadi sorotan ILRF ialah pekerja anak-anak di wilayah Sumatera Selatan. Masih di sektor yang sama yaitu perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit yang berada di Sumatera Selatan ini dikuasai oleh PT Sochfindo Bandun Bandar. ILRF kembali melakukan investigasi dan wawancara kepada 15 orang pekerja dimana dua diantaranya merupakan pekerja yang masih dibawah umur. Hal ini bukanlah pertam kalinya PT Sochfindo Bandun Bandar menjadi sorotan atas isu pekerja anak-anak. Di tahun 2007, berdasarkan survey yang dilakukan

oleh ILO ditemukan bahwa PT Sochfindo Bandun Bandar mempunyai pekerja anak dengan jumlah yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Sejak tahun 2010, Departemen Tenaga Kerja merilis daftar produk yang dibuat oleh kerja paksa dan tenaga kerja anak dimana Indonesia termasuk kedalamnya.

Kemudian di tahun 2015, ILRF bersama NGO dan juga organisasi buruh yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa dan juga Asia merilis laporan yang berisi solusi untuk membantu industri kelapa sawit agar dapat menghentikan segala tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak pekerja. mengacu pada Konvensi ILO, UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan hukum internasional lainnya, solusi ini berisi :

1. Menghormati hak-hak pekerja, termasuk kebebasan untuk berasosiasi, berunding dan juga hak untuk melakukan mogok kerja.
2. Menerapkan perekrutan yang etis dengan tidak membebankan biaya pada pekerja, tidak menyita paspor atau dokumen identitas mereka.
3. Meniadakan pekerja anak, termasuk kuota panen tinggi yang tidak realistis yang mengharuskan pekerja membawa anak-anak mereka ke tempat kerja;
4. Bertanggung jawab dengan merekrut pekerja secara langsung pada kontrak reguler dan tertulis dan membatasi penggunaan pekerja harian dan subkontraktor pada pekerjaan perkebunan non-inti yang bersifat sementara atau musiman;
5. Memastikan hak pekerja atas kesehatan dan keselamatan kerja dengan melarang pestisida berbahaya dan memberi mereka peralatan pelindung yang memadai tanpa biaya;
6. Berkomitmen untuk jam kerja yang wajar dan kemajuan menuju pembayaran upah hidup;

7. Membentuk mekanisme pengaduan yang sah, dapat diakses, dan transparan, konsisten dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
8. Berkomitmen terhadap transparansi dan pengungkapan data tenaga kerja dan proses perkebunan yang berarti.

3. Bangladesh

Permasalahan yang ada di Bangladesh terletak pada kondisi pekerjaan yang berbahaya dan juga standar upah yang sangat rendah. Kondisi ini terjadi terutama pada sektor tekstil. *International Labor Right Forum* mulai aktif dalam permasalahan yang terjadi di Bangladesh pada tahun 2010 melalui program *SweatFree Communities*. Program ini merupakan salah satu dari program ILRF yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang *Sweatshop-free*. (International Labor Right Forum, 2010) Yang dimaksud dengan *Sweatshop-free* ialah istilah yang digunakan untuk menyebut pabrik-pabrik yang mempekerjakan pegawainya dengan tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan di beberapa kasus pabrik-pabrik ini melanggar kebijakan publik yang berlaku. (Kusno, 2011)

Pada 24 April 2013, sebuah kecelakaan terjadi di Bangladesh. Insiden ini berupa runtuhnya gedung delapan lantai yang menampung lima pabrik garmen. Setidaknya sebanyak 1.134 pekerja garmen tewas dan 2.500 lainnya terluka. Banyak pekerja terluka yang terjebak di reruntuhan selama beberapa hari. Proses evakuasi yang cukup sulit mengharuskan beberapa pekerja yang terluka di amputasi di tempat kejadian. Setelah kejadian ini, ILRF berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai NGO lokal dan organisasi lainnya menuntut merk-merk pakaian yang pakaiannya diproduksi di Rana Plaza agar memberikan kompensasi penuh kepada korban serta

keluarganya. Dengan adanya kejadian ini diharapkan pemerintah Bangladesh mampu meningkatkan keamanan dan keselamatan di tempat kerja. (International Labor Right Forum, 2015)

4. Ghana dan Pantai Gading

Dua negara yang berada di Afrika Barat ini merupakan pemasok coklat dunia yaitu sebanyak 70%. Meskipun demikian, hal ini tidak menguntungkan petani yang memproduksi coklat. Mereka tidak mampu menjual coklat dengan harga yang pantas kepada perusahaan multinasional yang menguasai pasar. Hal ini menyebabkan para petani tidak mampu untuk mempekerjakan pegawai karena tidak mampu menggaji mereka. Hal inilah yang kemudian membuat para petani mempekerjakan anak-anak mereka di perkebunan kapas. Anak-anak terpapar bahan kimia, jam kerja yang panjang serta tidak mendapat pendidikan yang layak. (International Labour Organization, 2014)

ILRF telah sejak lama terlibat dalam permasalahan pekerja anak di Ghana maupun Pantai Gading. Puncaknya ialah di tahun 2011 bersama dengan *Global Exchange* dan *Green America* mengkampanyekan "*Raise the Bar, Hershey!*". Kampanye ini ditujukan kepada perusahaan coklat Hershey agar berhenti mempekerjakan anak-anak. Selain kampanye, di tahun 2012 ILRF juga mensponsori iklan yang berjudul "*Hershey's Chocolate: Kissed by Child Labor*" yang rencananya akan ditayangkan dalam acara tahunan *Super Bowl*. Dalam iklan ini ditampilkan anak-anak yang dipaksa bekerja untuk memproduksi coklat-coklat Hershey. Tidak seperti perusahaan lainnya yang setuju untuk bekerja sama menghapuskan pekerja anak, Hershey justru tidak memberikan tanggapan apapun atas kasus tersebut. Hershey juga menolak memberikan informasi dan izin kepada NGO yang ingin melakukan investigasi terhadap permasalahan pekerja di pabrik

coklat. Menanggapi iklan ini, Hershey akhirnya menyetujui untuk berkomitmen untuk sumber kakao bersertifikat independen untuk Bliss dan Dagoba pada akhir 2012. Meskipun jika dilihat tindakan dari Hershey ini tidak memberikan pengaruh yang besar kepada permasalahan pekerja anak namun Raise the Bar memutuskan untuk tidak menayangkan iklan ini.

ILRF juga giat melakukan kampanye salah satunya kepada *Whole Food* untuk tidak lagi menjual produk coklat Hershey. Mendapat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya pihak Hershey menyatakan bahwa mereka akan memasok coklat dari produsen yang bersertifikat mulai tahun 2020. (International Labor Right Forum, 2012)

2. China

Lebih dari satu dekade ILRF telah bekerja sama dengan universitas, organisasi masyarakat sipil dan juga praktisi hukum yang ada di Tiongkok. Kerja sama ini ditujukan untuk mendorong munculnya generasi baru di bidang hukum yang mampu memberikan bantuan kepada para pekerja. Karena di Tiongkok sendiri untuk saat ini terdapat lebih dari 270 juta migran pedesaan yang bekerja di industri manufaktur, konstruksi dan jasa. Namun, Banyaknya jumlah pekerja migran ini tidak sebanding dengan jumlah praktisi hukum yang menangani permasalahan hak pekerja. Partner ILRF di Tiongkok telah melatih dan bekerja dengan ratusan hakim, pengacara, siswa sekolah hukum, karyawan di pusat bantuan hukum pemerintah dan anggota Federasi Serikat Pekerja Seluruh Tiongkok (ACFTU). Kolaborasi luas seperti itu dengan sejumlah individu dan institusi telah menjadi kekuatan utama dari kerja ILRF di Cina.

3. Amerika Latin

Terdapat sebuah program ILRF yaitu USLEAP (*U.S. Labor Education in the Americas Project*) yang merupakan sebuah program bertujuan untuk

mengadvokasi perubahan pada kebijakan perdagangan AS, menuntut pertanggung jawaban dari perusahaan, mengancam kekerasan terhadap pekerja dan melakukan kampanye untuk menuntut keadilan bagi para pekerja di sektor pertanian. USLEAP mengusahakan terwujudnya perekonomian global yang dimana para pekerja diperlakukan dengan adil dan layak, mendapatkan upah yang sesuai dan dihormati baik oleh perusahaan maupun oleh negara. (International Labor Right Forum, 2016)

Pada awalnya USLEAP bernama *U.S./Guatemala Labor Education Project (US/GLEP)* , didirikan pada tahun 1987 oleh anggota serikat kerja yang prihatin atas kekerasan yang terjadi di pabrik Coca Cola Guatemala. Seiring dengan organisasi yang semakin berkembang organisasi ini kemudian memperluas fokus geografis dan sektoralnya dan pada tahun 1998 *U.S./Guatemala Labor Education Project (US/GLEP)* berubah menjadi USLEAP (*U.S. Labor Education in the Americas Project*). Sejak berganti nama menjadi USLEAP, fokus kerja organisasi semakin meluas ke beberapa negara diantaranya ialah Honduras, Kolumbia, Peru, Chili, Panama dan juga Mexico. Meskipun cakupan negara yang ditangani USLEAP semakin luas namun misi dari organisasi ini tetap sama yaitu :

1. Mendukung serikat pekerja yang bekerja di pabrik atau perkebunan tertentu yang memproduksi untuk perusahaan A.S
2. Memperhatikan kekerasan terhadap pekerja
3. Mengadvokasi aturan untuk perdagangan global yang melindungi hak-hak dasar pekerja (International Labor Right Forum, 2014)

4. Malawi

Malawi adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika Selatan. Perekonomian negara ini bergantung pada produksi tembakau. Pada tahun 2010, tercatat bahwa hasil

dari ekspor tembakau menyumbang sebanyak 52% bagi negara. Namun sangat disayangkan, lahan yang digunakan sebagai ladang tembakau yang ada di Malawi sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Rakyat Malawi hanya berperan sebagai petani penyewa. Mereka setuju untuk menanam tembakau sesuai dengan perintah pemilik lahan. Bayaran yang mereka terima juga tidak sesuai. Selain itu mereka hanya dibayar satu kali yaitu ketika tembakau tersebut terjual. Selebihnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani ini meminjam uang kepada pemilik lahan. Para petani juga tidak mendapatkan keterangan tentang berapa banyak jumlah tembakau yang terjual, mereka hanya menerima upah yang telah dikurangi pinjaman mereka kepada pemilik lahan. Setiap kilo tembakau dapat menjadi 1.200 batang rokok. Dari satu kilo tersebut, petani hanya mendapat upah sekitar 200 kwacha atau setara 30 sen.

Selain masalah diatas, ditemukan pula adanya masalah eksploitasi anak yang terjadi di Malawi. Anak-anak ini diminta untuk bekerja di ladang tembakau. Pekerjaannya mereka adalah membajak tanah, mengairi ladang hingga menanam tanaman tembakau. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak ini terlibat. beberapa diantaranya kemiskinan, hutang kepada tuan tanah, hingga tuntutan keadaan. Sungguh berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan dari penjualan rokok.

Telah sejak lama ILRF bekerja sama dengan serikat pekerja tembakau yang berada di Malawi. Serikat ini bernama TOAWUM (*Tobacco and Allied Workers Union of Malawi*). Di tahun 2014, aliansi ini mengirimkan surat kepada pemerintah Malawi. Dalam surat tersebut mereka meminta kepada pemerintah untuk segera membahas permasalahan ini dan tidak menunda-nunda. Mereka ingin pemerintah memberikan kepastian kepada petani bahwa mereka berhak untuk mendapatkan penghasilan yang

layak. Karena dalam permasalahan ini, perusahaan asing dianggap berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi di Malawi. (International Labor Right Forum, 2014)